

Jangkar Kebudayaan yang Hilang



Foto : Teuku Kemal Fasya. Credited by Bustami

Teuku Kemal Fasya

Kabar meninggalnya Radhar Panca Dahana pada 22 April 2021 bukan saja kehilangan seorang sahabat yang sangat intensif bicara tentang kesenian, filsafat, dan kebudayaan, tapi juga hilangnya satu jangkar penting dalam gerakan kebudayaan nasional. Kepergiannya setelah lebih 20 tahun menderita sakit ginjal adalah kehilangan darah segar bagi pegiat kebudayaan.

Ia termasuk sedikit orang Indonesia yang serius memikirkan kebudayaan nasional. Dalam banyak kesempatan, Radhar sangat bersemangat bicara tentang strategi kebudayaan di tengah eksistensi kebudayaan yang menurutnya telah kehilangan arah.

Apa yang dipikirkan, dibicarakan, dan dituliskan oleh Radhar beberapa hal tidak selalu bisa dikerangkai secara “akademik”. Baginya asumsi-asumsi teoretik-akademis, apalagi yang dilakukan di dunia kampus banyak yang sudah tertinggal, usang, dan normatif.

Mufakat Budaya

Rintisan “sejarah” saya bersama Radhar dimulai dengan hadirnya Mufakat Budaya yang dilaksanakan di sebuah hotel sekitar Cikini pada 2009. Even itu dilaksanakan setelah Pilpres 2009.

Saat itulah pertama kali saya bersahabat intim dengannya sekaligus menyaksikan aforismenya tentang reorientasi pembangunan budaya. Sebagai bangsa yang telah memanggul sejarah dan kehidupan ribuan tahun secara maritim, Nusantara menurutnya menjadi tempat bagi manusia beretos egaliter, kosmopolit, dan inklusif. Ironisnya hanya dalam rekayasa politik rejim Orde Baru, telah bertransformasi secara radikal membentuk manusia dengan mental priyayi, etnosentris, asal bapak senang, dan sektarian.

Pertemuan itu melahirkan dokumen historis yang dinamakan “Deklarasi Cikini”. Dokumen kebudayaan itu memiliki gema yang cukup kuat dan menjadi penanda strategi kebudayaan Radhar yang khas.

“Apa yang terjadi di Indonesia masa kini, adalah kebingungan dan kekeliruan yang akut di semua level dan elemen kehidupan kita. Praksis kekuasaan seperti itu merupakan produk dari sebuah pendekatan kebudayaan yang dilandasi oleh cara berpikir yang agraris, orientasi kedaratan atau kontinental.

Semua hal tersebut jelas mengingkari bukan hanya fakta historis bahwa bangsa-bangsa di Nusantara ini berjaya dan disegani dunia karena budaya maritimnya, sejak lebih dari 5.000 tahun SM, tapi juga daya hidup tradisinya yang memiliki kemampuan teruji untuk tetap berkembang, melakukan proses pertukaran budaya yang konstruktif dan mutualistis, dengan karakter dasarnya yang toleran, terbuka dan egaliter.”

Itulah *preambule* pertama dari kelembagaan yang kemudian identik dengan gerakan kebudayaan Mufakat Budaya. Deklarasi itu ditandatangani oleh 40 orang yang mewakili lintas profesi dan kepentingan.

Dari pertemuan itu saya melihat Radhar tidak lagi tersekat dan bertindak miopik hanya pada aspek kesenian, terutama teater, yang telah digelutinya sejak belia. Ia telah masuk pada dimensi yang dikatakan antropolog, E.B. Tylor, memperjuangkan kebudayaan sebagai nilai kehidupan kompleks yang dilakoni manusia dalam membentuk pikiran, kepercayaan, dan perasaannya.

Kebudayaan baginya harus melompati “batas-batas pembaratan” – istilah sejarawan Perancis, Denys Lombard. Narasi Nusantara selama ini tertutup pasir dan asap “orientalisme” sehingga gagal menembus otentisitas dan glorifikasi peradaban yang telah lama tumbuh. Gerakan Mufakat Budaya I itu terus terasa denyutnya hingga Mufakat Budaya III yang dilaksanakan sebelum Pilpres 2019.

Tanggal: 10 August 2021

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Artikel Opini](#), [Budaya Lokal](#),

Tags: [Nasional](#), [Jurnal](#),